

**PERTAMBANGAN NIKEL
DAN IMPLIKASI SOSIAL EKONOMI**

(Studi Kasus pada Warga Masyarakat di Sekitar Wilayah Industri Pertambangan
Kabupaten Konawe Selatan)¹

*Peribadi*²
*Suharty Roslan*³
*Samsul*⁴

ABSTRAK

Kajian ini merupakan bentuk studi “*before and after*” atas keberadaan industrialisasi pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan. Pendekatan kualitatif dalam konteks paradigma “*Phenomenologi*” digunakan untuk mengembangkan telaah-telaah kritis reflektif atas berbagai fenomena, realitas dan hiperealitas yang mengemuka di wilayah pertambangan, melalui instrumen pengamatan, wawancara mendalam (*deep interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis data sejak awal berlangsung dikembangkan dengan pendekatan “*hermeneutik fenomenologik*” (Muhadjir, 2011; Neuman, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alam pedesaan di masa lalu adalah tak ubahnya seorang gadis cantik yang demikian elok dipandang mata. Namun ketika disorot dari sudut pandang filsafat materialisme Karl Marx, maka kini alam pedesaan tak mempesona lagi dan bahkan rongga hidung menjadi tersendat dan dada terasa sesak, ketika mendapat ciuman beracun dari kaum industriawan. Betapa tidak, satwa-satwa sebagai suatu realitas ekosistem telah digantikan oleh satwa-satwa baru, seperti peralatan raksasa penumbang pepohonan, penggali dan pengangkut tanah nikel serta mobil-mobil karyawan perusahaan yang luluh-luluh seolah tak pernah berhenti dan tak kenal lelah dengan ekosistem khususnya tersendiri. Perkebunan dan persawahan, rumput laut, sumur-sumur dan sumber mata air yang menjadi andalan masyarakat selama ini, telah tertimpah malapetaka yang cukup dahsyat akibat dari penumbangan pohon-pohon raksasa dan galian tanah yang berlubang-lubang di sekitarnya. Sementara hasilnya hanya dinikmati oleh pemilik lahan.

Kata Kunci: industri, pertambangan dan sosial ekonomi

ABSTRACT

This study was a form of study “before and after” on the existence of mining industrialization in South Konawe Regency. Qualitative approach in the context of phenomenologic paradigm was used in the effort of developing reflective critical analysis on a variety of phenomena, realities, and hyperrealities that became the trending issue in the mining area through observation, deep interview, and focus group discussion (FGD). Since the beginning, the analysis of data has been developed with “phenomenologic hermeneutic approach” (Muhadjir, 2011; Neuman, 2013). This finding showed that rural area in the past was just like a beautiful girl who was so nice to look at. In the light of structural theory in the frame of materialism philosophy of Karl Marx, so now the rural area is not interesting anymore and even it is difficult to breathe when obtaining the poisonous kiss from the industrialists. It was unavoidable that the flora and fauna as

¹Hasil Penelitian

²Staf Pendidik pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: citaperibadi@gmail.com

³Staf Pendidik pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: suhartyroslan@yahoo.co.id

⁴Staf Pendidik pada Program Studi Tradisi Lisan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: barakatisamsul@yahoo.com

the reality of ecosystem have been replaced by new flora and fauna like the big equipment of the cutter of trees, the digger and transporter of nick soil and the employees' cars of the company as if they never stopped without feeling tired with its own unique ecosystem. The plantation and rice-fielding, sea weeds, the wells, and spring water that have become the reliance of the society so far have undergone the powerful enough calamity as the consequence of the cutting down of the big trees and soil digging which have holes around them. Meanwhile, the result was only enjoyed by the land owner. The implementation of Corporation and Social Responsibility (CSR) in the form of money and another aid was only given the priority to the eight villages of the tens of villages resulting in the hindrance in area of Palangga District and South Palangga District of South Konawe Regency.

Keywords: industry, mining, and economic social

A. PENDAHULUAN

Gemerlapan industrialisasi yang memancar pada kurun waktu “*paradigma developmentalisme*”, telah membuahkan pertumbuhan ekonomi yang demikian spektakuler. Namun di balik gegap-gempita industrialisasi dengan berbagai prestasi pembangunan yang telah sukses gemilang digapainya, juga tampak menyisakan sejumlah problematika sosial yang mencemaskan. Kesenjangan dan diskriminasi sosial, konflik horizontal dan vertikal, deforestasi dan degradasi lingkungan serta urbanisasi dan masalah demografis terus menggelebar di bumi persada (Hayami, 1987; Amaluddin, 1987; Trijono, 1994; Wahono, 1994; Salman, 1996; Tjondronegoro, 1999; Rijanta, 2008).

Aktivitas industri pertambangan apapun jenisnya telah memberikan dampak positif kepada kas negara dari pajak dan royalti. Namun pada sisi lain, keberadaan industri pertambangan selama ini telah menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan serta pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan itu. Akibatnya pemerintah tidak dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya, karena keuntungan pemerintah dari kegiatan tersebut hanya sedikit di bandingkan dengan biaya sosial lainnya (Basuki, 2007; Nurditha, 2008; Fenty, 2011).

Ketika para ahli dan pengamat pada umumnya menyorot penguasaan pertambangan oleh individu atau pihak asing telah melanggar Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat”. Konstitusi ini menandakan bahwa kegiatan apa saja tentang eksploitasi dan eksplorasi kekayaan sumber daya alam harus dikuasai oleh pemerintah demi peningkatan kesejahteraan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negara. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral tersebut adalah tidak saja berarti dapat menggali sebanyak mungkin tanpa memperhatikan stabilitas ekosistem dan unsur degradasi lainnya. Akan tetapi juga mengandung arti bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh haruslah maksimal bagi masyarakat, bangsa, dan negara republik tercinta ini.

Bumi Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengandung aneka jenis barang tambang, sebagaimana dikemukakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Muh. Hakku Wahab bahwa ada tujuh wilayah di Sulawesi Tenggara yang terindikasi mempunyai kandungan emas di antaranya adalah wilayah Bombana, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, Abuki dan Wawonii Kabupaten Konawe, serta Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Namun demikian, usia pengelolaan in-

dustri pertambangan yang masih seumur jagung itu, ternyata sudah diperhadapkan dengan masalah pemalsuan izin operasional serta pertambangan ilegal sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Pertiwi Agung dan PT. Akar Mas di lokasi IUP PT. Wijaya Inti Nusantara dan PT. Billy di Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Kapolres setempat, dua perusahaan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana *illegal minning* (Kendari Pos, 26 Juni 2012).

Demikian pula aksi ratusan warga Desa Watumerembe di Kecamatan Palangga terhadap PT. Jagad Raya Tama dengan tuntutan agar perusahaan pertambangan nikel ini tidak melakukan aktivitas pertambangan sebelum ada kejelasan tapal batas antara Desa Kiaeya dan Desa Watumerembe yang dapat menimbulkan konflik horisontal antara kedua warga pedesaan tersebut (Kendari Pos, 10 September 2012). Dalam konteks inilah yang menjadi *driving force* bagi Tim Peneliti untuk mengkaji keberadaan industri pertambangan dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan sosial ekonomi warga masyarakat di sekitar Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan secara lebih komprehensif.

Eksistensi industrialisasi pertambangan dan pengaruhnya terhadap kehidupan penduduk lokal di sekitarnya menjadi perdebatan panjang, aktual dan problematik sejak "*ideologi pembangunanisme*" menggeliat dan menggelejar. Industri pertambangan yang sangat diimpikan oleh warga masyarakat di sekitarnya untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan, tampil nyata mempertontonkan perilaku "eksploitasi kapitalisme agraris" berimpilikasi pemiskinan bagi petani yang menyelenggarakan kehidupan sosial ekonomi di sekitarnya. Atas dasar pemikiran inilah, maka permasalahan utama yang urgen dikedepankan adalah sejauh mana kontribusi perusahaan pertambangan terhadap tingkat kesejahteraan so-

sial ekonomi warga masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah pertambangan?

Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis reflektif melalui studi "*before and after*" atas implikasi sosial ekonomi keberadaan industri pertambangan yang telah beroperasi di beberapa wilayah pertambangan Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun 2000-an. Hasil kajian menjadi kontribusi dan solusi alternatif yang sangat berarti bagi semua pihak, terutama kepada pemerintah setempat, pengusaha pertambangan dan penduduk lokal.

Secara khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, hasil kajian tersebut dapat mendorong untuk menyusun sebuah kebijakan strategis serta program penanggulangan yang relevan dan solutif atas berbagai dampak negatif. Sementara bagi pihak perusahaan pertambangan, hasil penelitian tersebut merupakan kontribusi pemikiran ilmiah yang sangat penting direnungi dan dipertimbangkan sebagai upaya antisipatif atas menggeliatnya fenomena "konflik terselubung".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang menekankan pada interpretasi (*to interpret* atau *to understand*) seseorang terhadap sebuah simbol. Pendekatan kualitatif dalam konteks studi fenomenologi adalah berupaya mendeskripsikan fenomena dan realitas sosial yang terjadi di wilayah perkampungan transmigran, sehingga kepekaan peneliti dalam perspektif *verstehen* dibutuhkan ketika berhadapan dengan individu dan kelompok sosial ekonomi selama penelitian berlangsung (Denzin dan Lincoln, 1994; Neuman, 2013).

Unit analisis yakni sumber informasi pertama dan sekaligus menjadi unit analisis adalah *key informan* yang berasal dari kalangan karyawan PT. Jagad Raya Tama dan PT. Kembar Emas Sultra serta aparat pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan hingga ke tingkat

kelurahan/pedesaan. Namun selaku informan penunjang adalah mereka yang berasal dari berbagai pihak selaku tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh pendidik yang dipilih secara “*snowballing*” di lingkungan penelitian berlangsung.

Pada dasarnya, semua pihak yang dinilai layak memberikan informasi yang terkait dengan fokus penelitian dapat dijadikan sumber data. Namun untuk menggali data primer maka penelitian ini menggunakan metode “*field research*” melalui instrumen wawancara mendalam (*deep interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang sudah dipersiapkan. Beranjat dari semua data yang berhasil diperoleh, selanjutnya dilakukan FGD sebagai upaya memperoleh data yang lebih *valid* antara tim peneliti dan para *stakeholder* daerah (*indigenous people*) menyoal berbagai dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh warga masyarakat setempat sebagai akibat dari aktivitas pertambangan nikel dari PT. Jagad Raya Tama dan PT. Kembar Emas Sultra tersebut.

Data primer dan data sekunder yang berhasil dirampungkan akan dianalisis, baik pada saat penelitian sedang berlangsung maupun setelah penelitian lapangan. Teknik analisis data yang bersifat “*kualitatif interpretatif*” diproses melalui upaya penelaan data, reduksi data, kategorisasi data, pemeriksaan keabsahan data dan hingga pada penafsiran data (Milles dan Huberman 1992). Tindakan sosial diinterpretasi sesuai dengan *subjective meaning* dari semua fenomena sosial yang berorientasi pada konsep *understanding of social action* (Guba, 1985; Tarwotjo, 1994; Wuisman, 1996).

C. POTRET SURAM LOKASI PERTAMBANGAN

Alam pedesaan adalah tak ubahnya gadis cantik yang demikian elok dipandang mata. Dalam perspektif teori struktural yang berpangkal pada filsafat materialisme

Karl Marx, negara-negara pra-kapitalis di Asia adalah diibaratkan sebagai seorang puteri cantik yang masih tidur dan sedang menunggu ciuman sang pangeran tampan. Namun kemudian Marx tidak mengetahui bahwa ternyata ciuman itu adalah beracun. Demikianlah perumpamaan alam pedesaan kita ketika mendapat ciuman beracun dari kaum industriawan atau korporasi. Kini alam pedesaan yang cantik nan jelita itu seakan tak mempesona lagi, dan bahkan rongga hidung menjadi tersendat dan dada terasa sesak ketika dihampiri.

Polusi udara yang terus mengepul ke udara hingga menyebar ke seluruh permukaan daratan dan pesisir pantai di sekitar wilayah Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Kona-we Selatan, tampak tidak hanya membuat warga masyarakat kehilangan kenyamanan dan kesentosaan hidup sehari-hari sebagaimana yang pernah dinikmati di masa silam sebelum deru-debu mesin penggali dan pengangkut tanah nikel bergentayangan. Akan tetapi, juga menyebabkan lenyapnya satwa-satwa sebagai suatu realitas ekosistem yang kini telah digantikan oleh satwa-satwa baru, seperti peralatan raksasa penumbang pepohonan, penggali dan pengangkut tanah nikel serta mobil-mobil karyawan perusahaan yang lalu-lalang.

Alam pedesaan yang digambarkan Piliang (2008), pada masa lalu dilamari dengan bunyi siamang, alunan ombak yang berdenting dan angin sepoi-sepoi yang bertiuip demikian indah terasa karena menyatu dengan napas kehidupan sebuah perkampungan. Namun kini, peralatan industri pertambangan nikel dan mobil-mobil raksasa pengangkut tanah nikel yang terus berpacu dengan kecepatan tinggi adalah seolah sebuah balapan mobil yang tengah mengitari ruang sirkuit di tengah hutan belantara yang sekaligus menjadi pertanda takluknya alam terhadap deru-debu modernisasi dan industrialisasi yang tanpa tapal batas itu.

Betapa kita tidak hanya kehilangan satwa atau punahnya keindahan jenis lainnya nan mempesona itu. Akan tetapi, yang lebih fundamental adalah kita juga kehilangan rasa bersatu dengan alam semesta itu. Semua komponen masyarakat, terutama dari kaum elite daerah dan lokal seakan tidak peduli dengan kesunyian dan satwa-satwa tersebut. Semuanya seakan terlena dan terhipnotis dengan seonggok materi yang berpacu mengaung dengan kecepatan tinggi, sehingga penghancuran hutan belantara terus berlangsung. Cepat atau lambat, bencana kebakaran dan asap tebal akan menjadi titik kulminasi dari penghancuran itu. Inilah potret suram yang terus kita abaikan dan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi nanti. Apakah kita akan terus mengejar kulit, gaya, dan penampilan ketimbang isi, makna dan kedalaman. Apakah kita akan terus membiarkan kawula masa depan menjadi calon pasien rumah sakit jiwa ke depan? Semuanya kemudian bergantung kepada seluruh komponen dari berbagai lapisan masyarakat, bangsa, dan negara tercinta ini.

D. FENOMENA EKSPLOITASI AGRA- RIS

Fenomena eksploitasi hutan belantara tidak hanya bermasalah dalam konteks kerawanan ekosistem yang kemudian menampilkan aroma pemandangan yang tidak kondusif lagi sebagaimana keindahan yang pernah mempesona bagi penghuninya di masa silam, dan bahkan bagi seluruh makhluk hidup lain di sekitarnya. Akan tetapi, juga berdampak negatif dalam konteks polarisasi kehidupan sosial ekonomi, baik secara internal antara petani pekerja dengan petani pemilik maupun secara eksternal antar petani dengan petani berdasar. Betapa tidak, bagi sebagian kecil warga yang tak pernah diimpikan sebelumnya, kini tampak tersenyum manis karena sekonyong-konyong tertimpah rezeki 'nomplok' atas kepemilikan tanahnya di posisi pertambangan nikel, sehingga terus memperoleh ko-

mpensasi dan royalti dalam sekali pengalangan tanah nikel yang tersedot dan terangkut dari tanahnya. Namun bagi warga masyarakat kebanyakan sudah pasti hanya memperoleh secuil kompensasi sebagai belas kasihan dari gangguan kenyamanan hidupnya selama deru-debu mesin dan peralatan industri menggelegar di sekitar kampung kelahirannya itu.

Hasil amatan dan wawancara bebas dan mendalam dengan para informan di lapangan tampak menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan kepemilikan tanah di wilayah pertambangan nikel Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan adalah terjalin dalam bentuk interaksi antara pihak korporasi sebagai pemodal besar dengan pemilik tanah dari berbagai lapisan sosial masyarakat yang kini seolah sudah tampil menjelma sebagai Orang Kaya Baru (OKB) di desanya. Namun demikian, mereka itu tidak hanya berhadapan dan bergesekan langsung dengan pemodal raksasa dari pihak korporasi, tetapi juga berhadapan dengan pihak birokrat dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah yang terjalin secara timbal balik dalam bentuk kerjasama untuk sama-sama berupaya memiliki lokasi di wilayah pertambangan serta sekaligus saling membantu untuk menghadapi pihak korporasi domestik dan mancanegara itu.

E. PERTAMBANGAN NIKEL DAN DEGRADASI LINGKUNGAN SO- SIAL

Tampaknya, satu-satunya kata yang meski terasa tidak enak didengar oleh semua pihak bahwa sesungguhnya eksploitasi hutan belantara pegunungan merupakan bom waktu yang cukup misterius, sehingga cepat atau lambat bakal memborbardemen penghuni bumi pertambangan dan sekitarnya. Betapa tidak, gunung dan pegunungan yang ada di dalam Alqur'an disebut sebagai 'pasak' yang menjadi perekat zamrut katu-

listiwa, sehingga bumi menjadi kuat dan tidak terguncangkan. Kini, semua tampak terbabat habis dan digantikan dengan satwa-satwa baru berupa peralatan industri berat dan mobil-mobil raksasa yang membingungkan telinga dan membuat hidung para penghuninya tersumbat.

Kehadiran industri pertambangan nikel di Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat tertentu sebagai pemilik tanah di wilayah pertambangan. Akan tetapi, juga membawa dampak negatif berupa bencana alam dan kerusakan lingkungan yang kini tampak nyata di wilayah pertambangan Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan berupa: (1) jalanan rusak, berlubang, dan berdebu; (2) sawah dan tanaman lain menjadi kerdil bahkan mati karena sumber mata air sudah tidak ada (kering); (3) polusi suara dan kebisingan; (4) petani rumput laut rugi karena rumput lautnya mati; dan (5) banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, seperti petani sawah dan petani rumput laut sebagaimana yang mengemuka di Desa Lakara Pantai Kecamatan Palangga Selatan terhadap sekitar 200 KK warga masyarakat petani rumput laut kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat terkena dampak aktivitas eksploitasi itu.

Petani rumput laut Desa Lakara Pantai Kecamatan Palangga Selatan, sebelum kehadiran dan beroperasinya perusahaan tambang nikel di daerahnya, mereka selalu panen rumput laut dua kali sebulan, satu kali panen dapat menghasilkan sepuluh juta Rupiah per KK, sehingga dalam sebulan dapat menghasilkan dua puluh juta Rupiah per KK. Namun kini, setelah perusahaan beroperasi, jangankan dua puluh juta Rupiah per bulan, dua juta Rupiah saja susah didapat, karena rumput laut yang mereka usahakan tidak dapat berkembang dengan baik akibat gangguan debu yang mengempul dari jantung perusahaan nikel.

Meskipun pihak perusahaan telah melakukan ganti rugi, tetapi uang kompensasi tersebut tidak setara dengan penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya, ketika perusahaan belum datang dan belum beroperasi di sekitar perkampungannya. Lebih parah lagi, karena ternyata dampak operasionalisasi perusahaan tersebut telah mematikan mata pencaharian hidup sekitar 200 KK petani rumput laut. Hal ini tentu saja akan mengancam dan membahayakan kehidupan generasi mendatang di desa tersebut.

F. PERTAMBANGAN NIKEL DAN FENOMENA KONFLIK SOSIAL

Ada tiga indikator yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengkaji sumber permasalahan konflik yang terselubung dan/atau mengemuka di lapangan, oleh karena itu harus menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama pihak korporasi dalam menyelenggarakan serta melangsungkan operasionalisasinya di wilayah pertambangan.

Eksplorasi korporasi tambang nikel terhadap sumber daya alam yang ada di Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan, tampak dalam banyak hal keberadaan perusahaan tambang nikel belum memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Justru fakta empirik menunjukkan hal sebaliknya, perusahaan tambang nikel merugikan masyarakat lokal dan merusak lingkungan. Hasil-hasil tambang nikel hanya dinikmati oleh pemilik lahan, sementara itu bagi masyarakat banyak yang tidak memiliki tanah adalah tidak mendapatkan apa-apa, kecuali ampas dari keberadaan industri pertambangan tersebut.

Pertama, distribusi hasil tambang dan pemerataan (equality) belum kelihatan. Yang menikmati hasil tambang hanyalah para pemilik modal dan pemilik lahan sementara masyarakat kebanyakan yang tidak memiliki lahan hanya tampil menjadi penonton dengan segala konsekuensi nasib

yang bakal mengarah ke ruang kemiskinannya.

Kedua, masalah keadilan (justice), pemerintah dan korporasi sangat tidak adil terhadap masyarakatnya. Bantuan-bantuan perusahaan tambang, baik berupa uang, barang, maupun program CSR dan *community development* hanya diprioritaskan pada delapan desa dari puluhan desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan, di antaranya delapan yang selaku desa prioritas adalah: (1) Desa Kiaea; (2) Desa Watudemba; (3) Desa Waturapa; (4) Desa Ulu Lakara; (5) Desa Lakara Pantai; (6) Desa Kiaono; (7) Desa Amondo; dan (8) Desa Watumbohoti.

Ketiga ditinjau dari faktor keberlanjutan (sustainability) sebagai akibat dari eksplorasi sumber daya alam oleh perusahaan tambang nikel, maka secara *otomatically* mempengaruhi kesuburan tanah dan tingkat kesuburan tanaman dan persawahan masyarakat di sekitarnya. Tentu saja demikian, karena debu dan asap tebal yang mengepul ke udara tak mengenal waktu itu, adalah akibat langsung dari aktivitas perusahaan tambang yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat lokal. Tanaman perkebunan dan persawahan, tanaman rumput laut, sumur-sumur, dan sumber mata air yang menjadi andalan masyarakat selama ini mengalami masalah. Demikian pula *Income generating* dan ancaman degradasi lingkungan menjadi masalah serius bagi masyarakat setempat.

Keberadaan perusahaan tambang nikel seperti PT. Sambas Minerals Mining yang terdapat di Desa Watudemba Kecamatan Palangga, PT. Macika di Desa Kiaea Kecamatan Palangga, PT. Agung Perkasa di Desa Watumbohoti Kecamatan Palangga Selatan, PT. Hilcon di Desa Koeono Kecamatan Palangga, dan PT. Jagad Raya di Desa Koeono Kecamatan Palangga Selatan telah berdampak nyata dalam mempenga-

ruhi pola interaksi sosial dan pola hubungan sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Perubahan pola interaksi sosial masyarakat sangat jelas kelihatan terutama jika dibandingkan dengan keadaan sebelum perusahaan tambang nikel masuk dan setelah perusahaan tambang nikel beroperasi. Ketika industri tambang nikel melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan, secara otomatis dapat merubah pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pola interaksi sosial yang terjadi setelah masuknya industri pertambangan nikel adalah lebih diwarnai oleh interaksi sosial yang bersifat disosiatif atau hubungan sosial yang bersifat konflik-tual. Pertentangan yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat (antar keluarga), masyarakat dengan pihak perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pihak pemerintah (desa). Konflik tapal batas antara pemerintah kecamatan Palangga dan Palangga Selatan pun tidak bisa terhindarkan

G. PENUTUP

Gegap gempita industrialisasi pertambangan berdampak positif bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan serta menumbuhkembangkan kesejahteraan sosial ekonomi warga masyarakatnya. Namun pada sisi lain, tidak bisa dinafikan bahwa proses eksplorasi dan eksploitasi di wilayah pertambangan tampak nyata berdampak negatif dan bahkan cenderung mengancam ekosistem dan lingkungan hidup di sekitarnya.

Betapa tidak, dalam konteks usaha mata pencarian penduduk lokal tampak sama saja sebelum dan setelah keberadaan korporasi tersebut, dan bahkan cenderung mengalami degradasi pendapatan seperti yang dialami oleh komunitas petani rumput laut di Desa Lakara. Sementara dalam konteks waktu kegiatan usaha ekonomi cen-

derung berlangsung lama setelah keberadaan industri pertambangan, karena terlebih dahulu harus membersihkan limbah industri yang menimpahnya. Demikian pula dalam konteks kesempatan kerja bagi warga penduduk lokal hanya bisa ditempatkan pada lowongan kerja yang tidak membutuhkan skill sebagai tenaga buruh yang tidak terlatih.

H. REKOMENDASI

Pertama, seyogyanya ke depan kondisi pengelolaan produk tambang sebagai salah satu komoditi unggulan perlu ditata dan dikelola secara terpadu dengan memperhatikan berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan serta tidak menimbulkan *deferostese*, degradasi lingkungan hidup serta nilai budaya penduduk lokal.

Kedua, besar harapan agar para pelaku industri pertambangan, baik selaku investor lokal maupun asing agar tetap melaksanakan kegiatan pertambangannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan diselenggarakan sesuai hasil Amdal yang telah disimpulkan. Dalam konteks ini, proses pemanfaatan sumber daya alam harus berlangsung sesuai amanah konstitusi sebagai upaya mengantisipasi tsunami virus *the higher immorality* dimaksud Millz.

Ketiga, seyogyanya CSR berupaya dipadukan secara integral dan harmonis ke dalam empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility* serta seharusnya diserahkan kepada suatu lembaga independen untuk mengimplementasikan program CSR dan COMDEV tersebut.

Keempat, betapa amat mendesak kehadiran Perda khusus menyoal perlindungan lahan pertanian untuk mengantisipasi alih fungsi lahan dan apalagi konteks modus operandi perampasan lahan pertanian masyarakat yang acapkali dilakoni oleh kaum “petani berdasi”, melalui proses “eksploitasi kapitalisme agraris” di wilayah per-

kebunan kelapa sawit dan di wilayah pertambangan.

Kelima, dalam proses pengawasan Pemerintah Daerah harus melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk keluarga besar mahasiswa-mahasiswi sebagai putra-putri daerah Kabupaten Konawe Selatan atas keberadaan industri pertambangan dalam menjalankan eksploitasi dan eksplorasinya di wilayah pertambangan. Dan yang takkalah pentingnya adalah sangat penting untuk diberikan sanksi hukum dan sanksi sosial kepada pihak korporasi yang cenderung ‘banditisme’.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Satrio. 2007. Dampak Keberadaan Pertambangan Batu Bara PT. Viktor Dua Tiga Mega terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya, Studi di kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah.
- Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. (Eds.). 1994. *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno dkk., (2009), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fenty, Puluhulawa, 2011, *Potensi Tambang di Gorontalo: Berkah Atau Ancaman* Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Kikuchi, Hayami dan Yujiro. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Pedesaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhadjir, Noeng. 2011. *Metodologi Penelitian, Paradigma Positivisme Objektif, Fhenomenologi Interpretatif Logika Bahasa Platonis, Chomskyist, Hegelian dan Hermeneutik, Paradigma Studi Islam, Matematik Recursion-Set Theory & Struktural Equation Modeling dan*

Mixed, Rake Sarasin, Edisi VI
Pengembangan. Yogyakarta.

- Neuman, W. Lawrance. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh* diterjemahkan oleh Sofia Edina T. dari buku *Social research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th Edition*. Jakarta: Indeks.
- Rijanta, R, Dkk. (Ed.). 2008. *Geografi Perdesaan, Sebuah Antologi, Program Studi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi*. Yogyakarta: UGM.
- Tarwotjo, 1994, *Etnografi, Suatu Tantangan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjondronegoro, M.P. Sediono. 1999. *Sosiologi Agraria, Kumpulan Tulisan Terpilih, Penyunting: Sitorus, Felix dan Wiradi Gunawan, Yayasan Akatiga*. Bogor: IPB.
- Trijono, Lambang. 1994. *Pasca Revolusi Hijau di Pedesaan Jawa Timur*, Prisma 3 Maret. Jakarta: LP3ES.
- Wahono, Prancis. 1994. *Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijau*, Prisma, Maret, 1994. Jakarta: LP3ES.
- Wuisman, M.J.J.J..1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, Asas-Asas Penyunting M. Hisyam, Lembaga Penelitian Fekon*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Piliang, Amir, Yasraf. 1998. *Sebuah Dunia Yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*. Bandung: Mizan.
- Kendari Pos, 26 Juni 2012.
- Kendari Pos, 10 September 2012